

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah harus memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di dalamnya memuat program-program utama yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; serta penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. LKJIIP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 - 2026. Dalam kurun waktu satu tahun Keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan hasil yang baik namun ada sebagian program yang belum dicapai hal ini dikarenakan masih cukup banyak pula permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan visi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah harus memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di dalamnya memuat program-program utama yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; serta penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. LKJiP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 - 2026. Dalam kurun waktu satu tahun Keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan hasil yang baik namun ada sebagian program yang belum dicapai hal ini dikarenakan masih cukup banyak pula permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan visi

dan misi dalam lingkup tugas serta perannya masing-masing agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya. oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya. semoga LAKIP ini dapat memudahkan bagi semua pihak (*stakeholder*) yang berwenang untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Demikian LKJiP ini atas kerjasama dari semua pihak, khususnya pejabat struktural maupun fungsional serta staf administrasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan, serta tim penyusun LKJiP Tahun 2024 sehingga terwujud laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Salakan, Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



IBBRAN MALOTES, SP, MP
NIP. 19670428 200012 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Laporan Akuntabilitas ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 tersebut merupakan Instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam Laporan kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan serta capaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan rencana anggaran 2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki fungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Gambaran Umum.....	2
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KERJA	
2.1. Perjanjian Kinerja.....	13
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	16
A Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	32
4.2. Saran.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	8
Tabel 1.2	Sumberdaya Manusia Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan	9
Tabel 1.3	Jumlah Bezeting dibandingkan Formasi Tahun 2024.....	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2	Program Utama dan Pagu Indikatif	14
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	15

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari “*rule government*” menjadi “*good governance*”. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openes*) dan kerangka hukum (*rule of law*).

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Untuk menilai keberhasilan/ kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpijak pada konsep tersebut, maka

indikator kinerja tidak saja dari aspek input, output, tapi juga sampai pada outcome, benefit dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 yang memberikan gambaran kinerja selama kurun waktu satu tahun.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan komprehensif dalam suatu kerangka Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan siklus tersebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi misi tujuan dan sasaran secara selaras dan berkesinambungan setiap tahunnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun-tahun berikutnya.

1.3. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Tugas dan Fungsi :

Tugas

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- a. **Kepala Dinas** Mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan;
- b. **Sekretaris Dinas** Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan aset dan pengembangan di bidang kepegawaian serta pembinaan organisasi;

c. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** Mempunyai tugas :

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencanan, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
2. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
3. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
4. melakukan penyusunan anggaran;
5. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
6. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
8. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
9. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
10. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
11. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
12. melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya;

d. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** Mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan dan pelaporan kerja sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai pedoman kerja;
2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
3. mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pencegahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
4. memberikan pelayanan;
5. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana prasarana dinas;

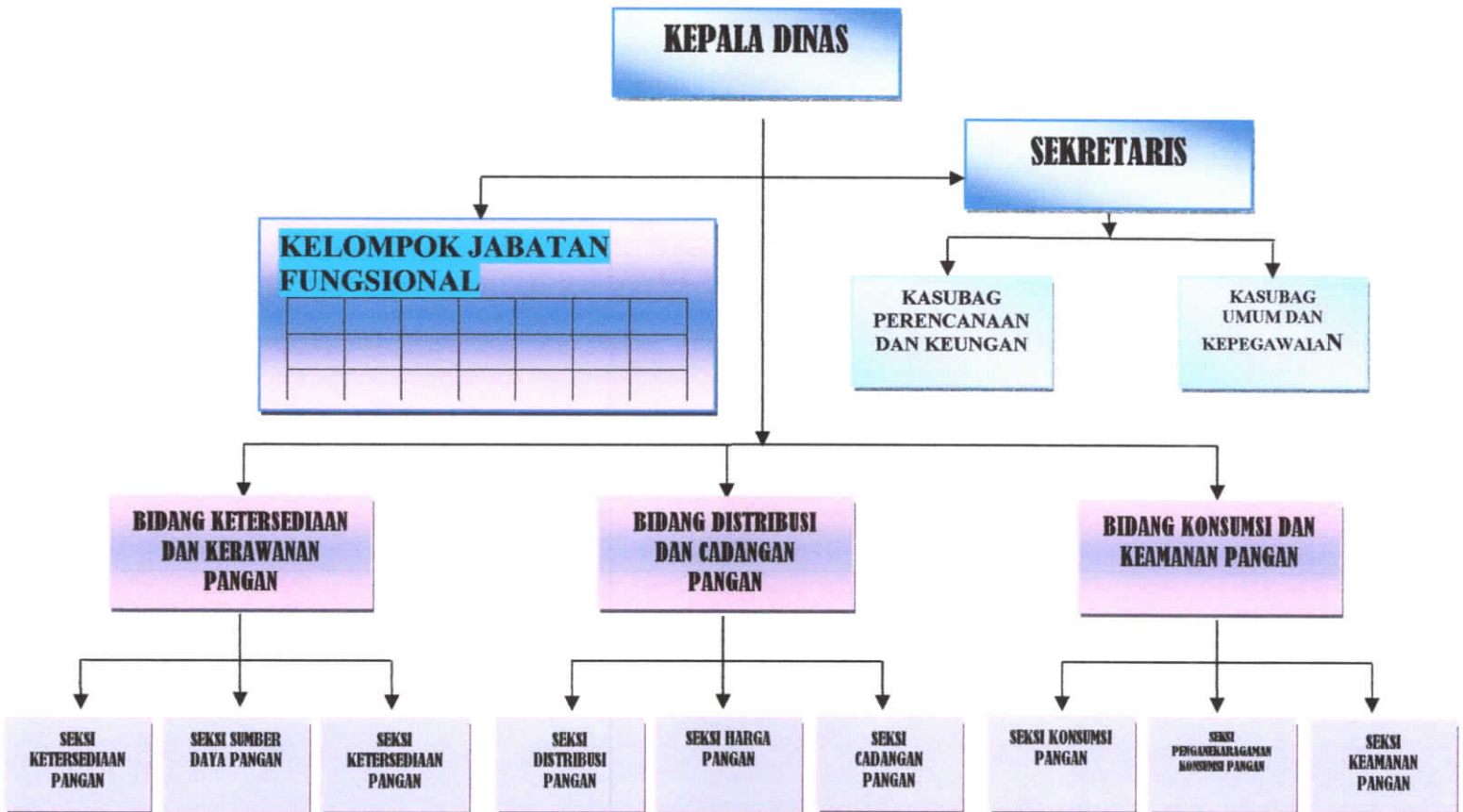
6. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas;
 7. memfasilitasi urusan pengadaan;
 8. menyusun analisis jabatan;
 9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyiapan perawatan, dan penghapusannya
 10. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagina umum dan kepegawaian; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya;
- e. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- f. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- g. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan;

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai kepulauan terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas;
- 2). Sekretariat Dinas yang membawahi 2 Sub.Bagian:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 3). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumberdaya Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan;
- 4). Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :

- a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Harga Pangan;
 - c. Seksi Cadangan Pangan;
- 5). Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan;
- 6). UPT; dan
- 7). Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



A. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana hasil analisa jabatan dan hasil analisa beban kerja didapatkan jumlah kelas jabatan sebanyak 26 Orang Adapun kekuatan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabuapten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	PNS	20
2	PPPK	6
3	Tenaga Honorer	14
	JUMLAH	40

No	Pendidikan	Golongan								Jumlah
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SLTA/SMK	-	-	-	2	-	-			2
2	Sarjana Muda/ (D-3)	-	-	1	-	1	-			2
3	Sarjana (S-1)	-	-	-	-	7	7	1		15
4	Pasca Sarjana (S-2)	-	-	-	-	-	2	4	1	7
5	Doctor (S-3)	-	-	-	-	-	-			
Jumlah		-	-	1	2	8	9	4	2	26

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

No	Jabatan	Golongan Ruang		
		Formasi	Terisi	Kurang
A.	Jabatan Struktural			
	1. Eselon II	1	1	-
	2. Eselon III	4	4	-
	3. Eselon IV	2	2	-
	4. Pelaksana			
	- Golongan III	1	1	-
	- Golongan II	2	2	-
B	Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan			
	1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	3	3	-
	2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	10	-
	3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya	-	-	-
	4. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama	-	-	-
C	Jabatan Fungsional Pranata Komputer			
	1. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	2	-
	2. Pranata Komputer Ahli Muda	-	-	-
	3. Pranata Komputer Ahli Madya	-	-	-
	4. Pranata Komputer Ahli Utama	-	-	-
	5. Pranata Komputer Terampil	1	1	-

Dalam melaksanakan beban kerja dalam suatu institusi pemenuhan sumber daya manusia perlu dipenuhi. Dalam hal ini pemenuhan jumlah SDM (bezeting) menjadi kekuatan Institusi untuk menyelesaikan beban kerja. Adapun perbandingan jumlah formasi dengan bezeting di Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel I.3. Jumlah Bezeting dibanding Formasi Tahun 2024

No	Jabatan	Formasi	Bezeting	Prosentase
1	Struktural	10	10	100%
2	Pranata Komputer	3	3	100%
3	Analisis Ketahanan Pangan	13	13	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dengan jumlah Formasi sudah seimbang dibandingkan dengan beban kerja.

A. Permasalahan dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan dan Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Belum Optimalnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian

- Kebutuhan pangan Kabupaten Banggai Kepulauan bergantung dari pasokan daerah sekitar
- Cadangan pangan. Kondisi iklim yang tidak menentu dapat menimbulkan bencana yang tidak terduga (banjir, longsor) sehingga memerlukan sistem pengaturan cadangan pangan yang baik untuk meminimalkan terjadinya rawan pangan. Kondisi saat ini yang belum optimal antara lain: (1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan tidur), (3) kelembagaanlumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan lainnya.

2. Belum optimalnya kemampuan mengakses pangan

- Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan akses pangan.
- Menjamin stabilitas harga pangan. Isu tentang stabilitas harga pangan dan pasokan pangan penting terutama apabila masa panen tidak merata sepanjang

bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen.

3. Masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal

- a. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat, namun konsumsi pangan sumber protein, umbi-umbian, sayur dan buah masih jauh dari harapan.
- b. Pengembangan pangan lokal terkendala oleh belum berkembangnya teknologi tepat guna dalam pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta, belum optimalnya usaha merubah perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, dan rendahnya citra pangan lokal.

4. Belum optimalnya mutu dan keamanan pangan

- a. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
- b. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang berbahaya khususnya pada jajanan anak sekolah
- c. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

B. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024

Laporan Kinerja merupakan media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabuptaten Banggai Kepulauan selama tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan dalam empat BAB yaitu :

- BAB I : Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, serta Aspek/Isu-isu Strategis Organisasi;
- BAB II : Memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Renstra;
- BAB III : Memuat capaian kinerja tahun 2024 dalam menyelesaikan isu-isu strategis, beserta analisis kendala dan strategi untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, dan realisasi Anggaran;
- BAB IV : Memuat kesimpulan kinerja dan rencana perbaikan kinerja selanjutnya.

II**PERENCANAAN KERJA**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) perencanaan kinerja yang diinformasikan dalam Bab II adalah Perjanjian Kinerja.

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2. 1
Perjanjian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	2.100
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	2400 Kkal/Kap/Hr
		Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	30 Desa

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis tersebut seluruhnya sebesar Rp. 4.864.025.000,- Jumlah melalui program-program sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Program Utama dan Pagu Indikatif

PROGRAM UTAMA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1. Program Penanganan Kerawanan Pangan	695.685.000,-
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	989.518.000
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	80.000.000
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	14.000.000
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.084.822.000,-

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahun anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:

Tabel 2. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan		2.100		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		2400 Kkal/Kap/Hr		
		Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan		30 Desa		

III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian Indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 s/d 100	: Memuaskan
80 s/d <95	: Berhasil
50 s/d <80	: Cukup Berhasil
0 s/d <50	: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian Indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian Indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

A. Capaian Kinerja Organisasi**1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (Satu) sasaran strategis dengan menggunakan 3 (Tiga) Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dari 3 (Tiga) Indikator yang ditetapkan 1 (Satu) Indikator memiliki capaian target Kinerja dengan Predikat “Memuaskan” 2 (dua) Indikator kinerja memiliki capaian target kinerja dengan predikat “Berhasil”.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat
Meningkatnya Ketahanan Pangan	IKU 1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	2.400	5.497	229	Memuaskan
	IKU 2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	2.100 Kkal/Kap/Hr	1.960	93,33	Berhasil
	IKU 3	Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	30 Desa	27 Desa	90	Berhasil

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan capaian masing-masing indikator kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		REALISASI		Kenaikan/ (penurunan)
			2023	2024	
Meningkatnya Ketahanan Pangan	IKU 1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	3.522	5.497	Kenaikan
	IKU 2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	1.806	1.960	Kenaikan
	IKU 3	Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	18	27	Kenaikan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Adapun perbandingan capaian masing-masing indikator kinerja dengan Standar Nasional sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		REALISASI		Kenaikan/ (penurunan)
			2024	Standar Nasional	
Meningkatnya Ketahanan Pangan	IKU 1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	5.497		
	IKU 2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	1.960		
	IKU 3	Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	27		

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan

Indikator ini diukur berdasarkan Hasil Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan FSVA Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Tahun 2024 adalah 5.497, melebihi dari target 2.400 atau 229%. Dari Data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Capain indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan sudah baik dengan predikat memuaskan.

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Indikator ini diukur berdasarkan Hasil Laporan Analisis (PPH Akhir Tahun. Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsusmsi Tahun 2024 adalah 1.960, dari target 2.100 atau 93,33%. Dari Data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Capain indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan sudah baik dengan predikat Berhasil.

c. Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangab

Indikator ini diukur berdasarkan hasil penanganan daerah rawan pangan. Realisasi indikator daerah rawan pangan tahun 2024 yaitu 27 Desa terbagi dari 2 Desa kategori prioritas 2, 6 Desa kategori prioritas 3, dan 19 Desa kategori prioritas 4 atau 90% dari target. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator jumlah daerah rawan pangan sudah baik dengan Predikat Berhasil.

5. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian Target Indikator Kinerja Utama dibutuhkan sumber daya yang cukup, salah satunya yaitu anggaran. Penganggaran yang efektif dan efisien akan sangat menentukan tercapainya Kinerja Organisasi sehingga dibutuhkan ketepatan dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tercapainya kinerja organisasi.

5.1 Realisasi Anggaran yang dialokasikan untuk Pencapaian IKU

Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 848.888.000 dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Utama. Realisasi Anggaran Tahun 2024 yaitu Rp 848.225.700 atau 99,92% dari Anggaran yang dialokasikan. Berikut Rincian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan	IKU 1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	153.203.000	153.120.700	99,9
	IKU 2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	0	0	0
	IKU 3	Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	695.685.000	695.105.000	100
TOTAL			848.888.000	848.225.700	99,92

5.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Berdasarkan perbandingan Persentase realisasi capaian target kinerja dan Persentase realisasi anggaran tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan secara keseluruhan Sudah Efisien, dari 3 indikator kinerja utama tidak ada Persentase Capaian Target Kinerja yang Tidak Efien.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Target Kinerja Tahun 2024	% Realisasi Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	100	0	1,00	Efisien
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100	0	1,00	Efisien
		Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	27	100	1,00	Efisien

Keterangan: >1= Tidak Efisien
=>1= Efisien

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

6.1 Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja Utama

Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2024 telah sesuai dengan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 sehingga capaian Realisasi Kinerja Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja Utama adalah 99,92%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penunjang kinerja utama telah dilaksanakan sesuai target kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan FSVA	1 Laporan	1 Laporan	100.00	153.203.000	153.203.000	100.00

	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	- -	Jumlah Laporan Analisis PPH Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100.00	0	0	0
	Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yg Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Penanganan Daerah Rawan Pangan	30 Desa	27 Desa	93.33	695.685.000	695.685.000	100.00

6.2 Realiasi Kinerja Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Utama

Jumlah Kegiatan yang terealisasi sesuai dengan target yaitu 3 dari 3 Kegiatan Indikator Kinerja Utama atau 99,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

Sasaran Strategis	Indikator	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	Penyusunan Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan FSVA	Jumlah Laporan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan FSVA	1 Laporan	1 Laporan	100.00
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Penyusunan Laporan Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah Laporan Analisis PPH Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100.00
	Presentase Penurunan Desa Rawan Pangan dan Rentan Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Daftar Penanganan Daerah Rawan Pangan	30 Desa	27 Desa	93,33

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 sebesar Rp. 4.857.375.203, atau terserap 99,86% dari Anggaran tahun 2024 yaitu Rp. 4.864.025.000, Berikut Rincian Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja dan Realisasi menurut Program Kegiatan Tahun 2024:

1. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2.489.885.000		
2	Belanja Barang dan Jasa	2.286.931.000		
3	Modal Peralatan dan Mesin	87.209.000		
	Total	4.864.025.000		

2. Realisasi Kinerja Dan Anggaran Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai Kepulauan T.A 2024

No	Uraian Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Realisasi Kinerja dan Anggaran					
			Target (K)	Target (Rp)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	% (K)	% (Rp)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	12.936.000	6 Laporan	12.936.000	100	100

		Iktisar Realisasi Kinerja SKPD						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Peyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	1.783.468.000	26 Orang	1.781.457.465	99,9	99,9
	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	627.457.000	20 Dokumen	627.154.666	100	100
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sediakan	9 Paket	48.348.000	9 Paket	48.348.000	100	100
	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	24.000.000	2 Paket	23.995.400	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 Dokumen	7.950.000	24 Dokumen	7.902.000	99,4	99,4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Laporan	172.407.000	64 Laporan	171.775.000	99,6	99,6

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	291 Laporan	3.492.000	291 Laporan	3.492.000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunika Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Jenis	13.330.000	4 Jenis	13.250.900	99,4	99,4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	294.434.000	3 Laporan	294.382.000	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	2 Unit	85.000.000	2 Unit	84.977.600	100	100
2	PENGLOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							
	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kamandirian Pangan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	100	100

3	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	39 Laporan	153.203.000	39 Laporan	153.120.700	99,9	99,9
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	100	100
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan							
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,4 Ton	246.000.000	1,4 Ton	245.920.000	100	100
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	1,4 Ton	550.315.000	1,4 Ton	550.003.472	99,9	99,9
4	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
	Penanganan Kerawanan Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengelolaan,	1 Dokumen	695.685.000	1 Dokumen	695.105.000	100	100

	Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota						
5	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sarana Pengujian Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	48.113.000	96	96
	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	29.450.000	99	99
				4.864.025.000		4.857.375.203		99,86

IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024. Penyusunan LKJIIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKJIIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah Baik. Dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama Terdapat 1 Indikator Kinerja dengan capaian target kinerja dengan Predikat “memuaskan”, dan 2 (dua) capaian target kinerja dengan Predikat “berhasil”.
2. Penggunaan Sumber daya Anggaran dalam Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Sudar efisien, Dengan Realisasi Anggaran Sebesar 4.857.375.203 dari jumlah pagu pada tahun 2024 sebesar 4.864.025.000, atau terserap 99,86 %
3. Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama yaitu 99,92%.

4.2. Saran

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pencapaian sasaran yang belum tercapai, maka ada beberapa penyelesaian yang akan ditempuh, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur Dinas melalui pengiriman aparatur ke berbagai diklat ketahanan pangan,
2. Peneyediaan dana dan prasarana yang memadai sehingga perencanaan dan pengawasan setiap kegiatan yang di mantapkan,
3. Trasnparansi dalam pengelolaan dan pelaporan setiap kegiatan.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik bagi Dinas LkjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai umpan balik dan acuan perencanaan tahun berikutnya, sebagaimana fungsi pokok dan tujuan dari penyusunan LKjIP. Dengan LKjIP yang semakin baik dan berkualitas, diharapkan akan menjadi pendorong terwujudnya Ketahanan Pangan yang tangguh untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Salakan, Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan



JIBRAN MALOTES, SP,MP
Nip. 19670428 200012 1 003